

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikatan Primordialisme dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 masih sangat kuat. Hal ini merupakan sebuah rentetan panjang selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang dimulai dari Pilkada tahun 2005, tahun 2010, sampai dengan Pilkada terakhir tahun 2015. Hasil dari setiap Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sijunjung menegaskan bahwa suara pemilih dari setiap kecamatan cenderung akan diberikan dan memenangkan calon yang berasal dari kecamatan yang sama dengan pemilih tersebut.

Fenomena Primordialisme dalam masyarakat Sijunjung ini tidak terlepas dari budaya masyarakat Minang pada umumnya. Masyarakat Sijunjung sendiri merupakan bagian dari masyarakat Minang secara keseluruhan. Seperti yang diketahui secara umum bahwasanya masyarakat Minang itu bersuku-suku, berkaum-kaum, dan kental dengan ikatan adat istiadat. Hal inilah juga lah yang telah mendarah daging pada masyarakat Sijunjung dengan budaya Minangnya. Ikatan bersuku dan berkaum tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat Sijunjung. Hal yang telah dibawa secara lahiriah inilah menjadi salah satu faktor yang menguatkan masyarakat di Sijunjung untuk menentukan pemimpinnya. Baik itu untuk tingkat paling bawah seperti pengangkatan datuak, wali nagari, bahkan sampai Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati. Mereka akan lebih mengutamakan ikatan-ikatan yang ada dengan diri mereka sendiri terhadap pilihannya.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku Primordialisme dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015 ini adalah isu putra daerah yang diangkat oleh para masing-masing calon di daerahnya. Para calon beserta tim suksesnya menganggap bahwa isu putra daerah yang dibawa dalam berkampanye merupakan suatu cara yang paling mudah untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Isu ini dianggap bisa menjalin suatu perasaan emosional dengan pemilihnya, seakan ada sebuah ikatan yang antara calon dengan pemilihnya. Dalam penelitian ini, hal ini dibenarkan oleh para calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015 yang lalu. Baik itu dilakukan oleh calon itu sendiri ataupun oleh tim sukses yang berada disekitar calon tersebut.

Kedua faktor tersebut bisa dikatakan bahwa antara faktor yang satu saling menguatkan dengan faktor yang lainnya. Sehingga perilaku Primordialisme yang terjadi dalam Pemilihan yang telah terjadi di Sijunjung dalam rentang 2005 sampai sekarang akan sulit untuk dilepaskan. Bahkan hal ini bisa menjadi sebuah peristiwa yang akan berulang-ulang sampai pada pemilihan-pemilihan yang berikutnya.

Temuan dan hasil penelitian di atas sejalan dan menegaskan teori yang telah menjelaskan bahwa Sikap Primordialisme itu merupakan suatu kondisi dari setiap individu yang dibawa sejak lahir, baik itu tradisi, suku, budaya, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang telah ada dan menetap di dalam lingkungan pertama individu tersebut. Dan Kondisi-kondisi inilah yang

mengarahkan individu tersebut untuk menentukan sikap dimana kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya sendiri.

Sikap ini juga lah yang menentukan individu tersebut untuk memilih siapa yang diterimanya atau ditolaknya untuk menjadi pemimpinnya. Sikap ini lebih mengarahkan mereka pada pilihan untuk memilih orang asli bagi mereka untuk jadi Bupati dan Wakil Bupati ketimbang orang pendatang.

Terkait dengan pemilih yang Golput di Kecamatan Tanjung Gadang dan kecamatan Lubuk Tarok pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2015, yang juga menjadi bagian dari penelitian ini, menemukan hasil bahwa sikap Golput masyarakat di dua Kecamatan ini tidak terkait dengan karena tidak munculnya calon pada masing-masing kecamatan ini. Kalau dilihat dari preferensi memilih di dua kecamatan ini, sikap primordialisme pada dua kecamatan ini tetap melekat pada calon yang berasal dari kecamatan terdekat dengan mereka. Tetapi pada umumnya alasan yang mereka kemukakan untuk tidak ikut memilih dapat digolongkan pada dua kategori saja yaitu Golput Politis dan Golput Teknis Politis. Pertama, Golput Teknis yang disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat Teknis saja yaitu mereka yang lebih memilih bekerja daripada memilih, tidak berada di daerah domisili pada saat pemilihan, sedang kuliah. Kedua, Golput Teknis Politis yang disebabkan oleh alasan-alasan seperti tidak terdaftar di DPT, Tidak Mendapatkan Formulir undangan (C6), Terdaftar di TPS yang jauh dari rumahnya.

Untuk Golput yang terjadi di kecamatan Tanjung Gadang dan Lubuk Tarok ini tidak sejalan dengan apa yang diasumsikan di awal penelitian ini. Asumsi yang terbangun diawal penelitian ini adalah bahwa Golput yang terjadi di

Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok tersebut disebabkan oleh sikap primordialisme masyarakat seperti yang telah dijelaskan juga dalam penelitian ini. Kemunculan calon pada setiap kecamatan sangat mempengaruhi masyarakat Sijunjung sendiri untuk memilih, sehingga ketidakmunculan calon pada dua kecamatan ini menyebabkan para pemilih untuk bersikap Golput. Hal ini tidak terbukti dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil yang ditemukan melalui wawancara dengan beberapa informan dan telaah terhadap beberapa dokumentasi yang ada.



6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari analisis perilaku Primordialisme dan Golput masyarakat Sijunjung dalam Pemilihan Kepala Daerah, maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada ke depan. Adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Perlunya edukasi atau pendidikan politik yang secara kontinyu kepada masyarakat untuk lebih mengedepankan aspek-aspek yang berhubungan dengan kompetensi para kandidat atau calon pemimpin yang akan mereka pilih.
2. Para calon atau kandidat pemimpin, diharapkan untuk lebih membawa isu-isu positif dan mengedepankan visi misi yang telah direncanakan kepada masyarakat dalam mengkampanyekan dirinya sehingga masyarakat juga bisa menentukan pilihan berdasarkan hal positif tersebut.
3. Bagi penyelenggara Pemilu sendiri, harus menjadi evaluasi bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas himbauan untuk memilih saja, tidak hanya sosialisasi dalam bentuk acara-acara seremonial saja. Penyelenggara Pemilu harus lebih bisa mengidentifikasi serta mengkolaborasikan sosialisasi yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Khususnya pada daerah-daerah yang tidak didukung oleh calon yang berada di daerah tersebut, seharusnya sosialisasi pada daerah kosong ini lebih intens dan frekuensinya lebih besar dari daerah yang didalamnya didukung oleh calon yang berasal dari daerah tersebut.

4. Terkait dengan data Pemilih, yang dapat menyebabkan seseorang Golput karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih, Dirasa perlunya sebuah sistem pendaftaran pemilih yang mumpuni yang mana sistem pendaftaran pemilih ini diharapkan menjamin akurasi daftar pemilih dari pemilu ke pemilu.

Bagi peneliti selanjutnya yang fokus pada bahasan tentang Primordialisme dan Pemilih Golput dalam Pilkada, untuk dapat mengkaji dan menganalisa lebih dalam lagi baik itu di wilayah administrasi yang berbeda ataupun kasus yang berbeda. Semoga penelitian ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan Ilmu Politik khususnya kajian tentang Primordialisme dan Golput dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

